

## **VI. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan dari pembahasan di atas mengenai pola rekrutmen DPD Partai Demokrat Lampung dalam menetapkan calon legislatif pada pemilu 2014. Penulis akan menyimpulkan pola rekrutmen yang terdapat pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pada pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrat menggunakan sifat rekrutmen terbuka, yang artinya Partai Demokrat juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengetahui secara luas terkait syarat dan prosedur yang digunakan. Secara eksplisit hal tersebut mengindikasikan DPD Partai Demokrat Lampung memberikan kesempatan calon eksternal untuk masuk sebagai calon anggota legislatif dari Partai Demokrat. Kemudian, pada komposisi yang diajukan oleh DPD Partai Demokrat pada pemilu 2014 terdapat 45 calon legislatif dari internal partai dan 37 calon legislatif dari eksternal dengan memperhatikan kuota 30% keberempuanan. Selain itu juga Partai Demokrat juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk menilai calon legislatifnya melalui posko pengaduan yang disediakan di sekretariat DPD Partai Demokrat Lampung.

2. DPD Partai Demokrat dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode non ilmiah. Hal tersebut terlihat dari DPD Partai Demokrat hanya melakukan rekrutmennya didasarkan aturan yang berlaku yang kemudian diterjemahkan ke dalam skoring penilaian yang berisi terkait kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan calon legislatifnya. Namun, DPD Partai Demokrat tidak melakukan suatu sarana yang bersifat ilmiah seperti metode survei dalam menetapkan calon legislatifnya.
3. DPD Partai Demokrat dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderungan *partisan*. Hal tersebut terlihat dalam mekanisme skoring yang digunakan oleh DPD Partai Demokrat Lampung pada kriteria yang dimiliki oleh kader internal seperti perjuangan sejarah partai, posisi struktural di partai, sejarah pelatihan yang pernah diikuti, dan keaktifan kader. Selain itu, DPD Partai Demokrat Lampung juga mempertimbangkan kecenderungan *compartmentalization* dan *civil reform service* meskipun tidak begitu dominan. Secara umum dalam sistem penilaian yang digunakan untuk menetapkan calon legislatifnya, berisi kriteria-kriteria yang cenderung menguntungkan calon internal, meskipun secara rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat menggunakan sifat rekrutmen terbuka.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang di dapat penulis pada penelitian mengenai pola rekrutmen DPD Partai Demokrat Lampung dalam menetapkan calon

legislatif pada pemilu 2014. Ada beberapa saran yang disampaikan oleh penulis mengenai pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai Demokrat yakni sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan rekrutmen politik, diharapkan DPD Partai Demokrat lebih transparan dan lebih kreatif lagi dalam memberikan peluang bagi masyarakat untuk menilai calon legislatif yang diusung seperti tidak hanya membuka posko pengaduan disekretariat DPD Partai Demokrat, tetapi bisa juga dengan membuka SMS Center bagi masyarakat yang ingin memberikan kritik dan saran yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan evaluasi objektif sesuai dengan masukan yang diberikan.
2. DPD Partai Demokrat Lampung harus lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pola rekrutmen yang akan digunakan agar dapat menghasilkan tahapan-tahapan proses rekrutmen yang dapat memicu hadirnya calon legislatif yang berkualitas seperti ada baiknya DPD Partai Demokrat Lampung pada pemilu yang akan datang tidak hanya berpatokan pada penggunaan sitem penilaian saja, tetapi juga harus disertakan juga proses *fit and propert test* dalam merekrut calon legislatif khususnya pada saat seleksi hingga menetapkan calon legislatif yang akan diusung.
3. Meskipun DPD Partai Demokrat Lampung dalam rekrutmennya lebih cenderung mengedepankan calon internal dibandingkan calon eksternal partai, DPD Partai Demokrat harus mempertimbangkannya secara ketat dan objektif. Hal ini penting guna untuk membuktikan bahwa DPD Partai Demokrat memang melakukan secara serius dalam rekrutmen calon

legislatifnya untuk menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, aspiratif dan amanah terhadap tanggung jawab.